

Tatakelola Kolaborasi Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat

Deden Saputra

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: dedensaputra696@gmail.com

Abstract

Tamansari tourism village is one of the tourist villages in the City of Yogyakarta which is included in the Stubs category. Of course this is not expected, because Tamansari tourism village has a lot of potential. Community-based tourism development collaboration is the answer to overcome these problems. The concept of collaboration in the development of community-based tourism is expected to make Tamansari tourism village develop or be independent. This research method uses descriptive qualitative type, in knowing tourism collaboration management, data analysis is used by emphasizing structured and unstructured interview instruments in order to obtain complete data. This research concludes that the collaboration does not fully implement the principles of collaboration, and the collaborative process does not work in synergy. The results showed that stakeholders who played a direct role in tourism development were the Yogyakarta city tourism office, Patehan village head, academics, village tourism managers, and tourism service providers / providers. The pattern of cooperation between the government and the community is in the form of guidance, and collaboration between the academics and the community is in the form of studies. Exclusive facilitative and institutional leadership has become an obstacle to the collaborative process of developing Tamansari tourism village.

Keywords: Collaborative Governance, Tourism Village, Tourism Development collaboration.

Abstrak

Kampung wisata Tamansari merupakan salah satu kampung wisata yang berada di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori "Rintisan". Tentu hal ini bukan yang diharapkan, karena kampung wisata Tamansari memiliki banyak potensi. Kolaborasi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adanya konsep kolaborasi dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadikan kampung wisata Tamansari berkembang atau mandiri. Metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dalam mengetahui tatakelola kolaborasi wisata di gunakan analisa data dengan menekankan instrumen wawancara terstruktur dan tidak terstruktur bertujuan agar diperoleh data yang komplit. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama yang terjadi belum seutuhnya menjalankan prinsip kolaborasi, dan proses kolaborasinya tidak berjalan secara bersinergi. Hasil penelitian menunjukan stakeholder yang berperan dalam pengembangan secara langsung adalah dinas pariwisata kota Yogyakarta, lurah Patehan, akademisi, pengelola kampung wisata, dan pelaku/penyedia jasa wisata. Pola kerjasama pihak pemerintah dengan masyarakat berupa pembinaan, dan kerjasama pihak akademisi dengan masyarakat berupa pengkajian. Kepemimpinan fasilitatif dan Kelembagaan yang eksklusif menjadi faktor penghambat proses kolaborasi pengembangan kampung wisata Tamansari.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kampung Wisata, kolaborasi Pengembangan Wisata.

PENDAHULUAN

Salah satu destinasi wisata yang sedang dipromosikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini adalah wisata Kampung, wisata kampung menjadi salah satu alternatif wisata primadona kunjungan wisatawan. Saat ini Kampung atau desa wisata menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun wisatawan lokal dengan menawarkan produk berupa alam dan budaya (Dinar, 2019; Hidayah & Fatoni, 2019). Menurut Rencana Strategis Dinas Pariwisata DIY pada Tahun 2008 jumlah kampung atau desa wisata hanya berjumlah 30, seiring adanya pertumbuhan kampung atau desa ingin ikut berpartisipasi dalam wisata menjadikan kampung atau desa wisata pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah sangat pesat menjadi 112 kampung.

Dari perkembangan itu dapat di pahami bahwa banyaknya kampung atau desa yang ikut berpartisipasi membuat kualitas persentasenya rendah karena masih ditemui berbagai permasalahan dalam pengembangannya (Agus, 2016). Setidaknya dalam menciptakan pelayanan yang baik untuk kunjungan wisatawan ke Yogyakarta Dinas Pariwisata DIY mempunyai 4 program strategis pelaksanaan wisata, yaitu pada pengembangan destinasi, pemasaran, kemitraan, dan pengembangan desa/kampung wisata. Semua program di atas akan terlaksana melalui kegiatan strategis, prioritas, efektif, dan efisien. Secara sinergi berkaitan dengan tatakelola wisata yang baik maka pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban dalam upaya pengembangan.

Pada 2018 Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melakukan akreditasi kampung wisata yang sudah berjalan pada 8 kampung, yaitu: kampung Gedongkiwo, kampung Sosromenduran, kampung Kadipaten, kampung Warung Boto, kampung Rejowinangun, kampung Cokrodiningrat, kampung Tamansari, dan Kampung Dipowinatan (Arifa, 2018). Akreditasi ini di berikan berdasarkan PERWALI

Yogyakarta No. 115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan kampung wisata. Tujuan dari akreditasi ini agar mempermudah pemerintah dalam membantu pengembangan Kampung wisata yang terkait melalui kategorinya masing-masing (Hidayah & Fatoni, 2019).

Kampung wisata Tamansari sudah melewati akreditasi sebagai kampung wisata dalam kategori "Rintisan" (Arifa, 2018). Kampung wisata Tamansari mempunyai potensi serta peluang yang besar di bandingkan kampung wisata lain karena dari peningkatan wisatawan yang ada di Objek Wisata Tamansari (Water Castel). Penelitian ini pun menjadi menarik karena saat ini baik pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat berusaha untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Kampung Tamansari. Ini menyatakan bahwa kampung atau desa wisata suatu bentuk baru yang penerapan pariwisata dengan berbasis masyarakat (Community Based Tourism 'CBT') dan berkelanjutan, yang dimana dalam pembangunan pariwisata ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi khususnya pada pengembangan destinasi (Sidiq & Resnawaty, 2017).

Melalui analisis sumber informasi yang ada, permasalahan mendasar penelitian ini di lakukan karena Kampung wisata Tamansari belum berkembang dengan baik karena tidak termasuk dalam kriteria sebagai kampung wisata mandiri atau pun berkembang dari segi kelembagaan, produk, pelayanan (sarana & prasarana), dan pengelolaan yang ada di nilai masih kurang dan perlu penguatan serta peningkatan kualitasnya (Hidayah & Fatoni, 2019; Rusqiyati, 2019). Juga menghadapi permasalahan seperti masalah kerjasama antara stakeholder yang masih belum optimal.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di kampung wisata Tamansari harus ada peran yang optimal antara masing-masing stakeholder dengan tatakelola kolaborasi secara strategis dan sinergis melalui pihak terkait untuk mengatasi permasalahan

pengembangan kampung wisata Tamansari yang begitu kompleks dan tidak bisa di atasi hanya dengan satu pihak (Dwiyanto, 2015; Zaenuri, 2017). Agar nanti kedepannya Kampung Wisata Tamansari dapat menjadi kampung dengan krakteria Berkembang dan maju. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui bagaimana pengembangan kampung taman sari dari segi Tatakelola kolaborasinya dengan melihat kendala yang ada dalam proses kerjasamanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, patut dipertanyakan beberapa hal sebagai berikut: 1) Bagaimana peran pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam pengembangan wisata kampung Taman Sari? 2) Bagaimana pola hubungan kerjasama yang terbentuk? dan 3) Bagaimana Tatakelola kolaborasi di antara stakeholder?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. maka dalam mengetahui tata kelola wisata di gunakan analisa data secara kualitatif. Peneliti juga memaparkan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, adapun penelitian ini sebagai penelitian yang di lakukan untuk mendeskripsikan tentang Tata Kelola Pengembangan Kampung Wisata Taman Sari Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta.

Untuk menentukan subjek pada penelitian ini di pergunakan dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menekankan pada kualitas informan dan bukan kuantitas atau jumlah informan. Dalam memperoleh data untuk penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, teknik interview atau wawancara, dan juga teknik dokumentasi.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data Matthew B. Miles (1992) dalam Salim (2006) yang terdiri dari pengumpulan data, pemilihan data (reduksi data, penyajian data, Langkah selanjutnya menarik kesimpulan dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Stakeholder Terkait Pengembangan Kampung Wisata Tamansari

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang individu atau kelompok melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, itu mempunyai arti bahwa mereka telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2002). Pada suatu program pembangunan berdasarkan peranannya dapat diklarifikasi sebagai berikut:

1. Policy creator yaitu stakeholder yang berperan mengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan.
2. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
3. Fasilitator yaitu stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi yang dibutuhkan kelompok sasaran.
4. Implementer yaitu stakeholder yang berperan sebagai pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran.
5. Akselelator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberi kontribusi agar suatu program berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya (Nugroho, Zauhar, & Suryadi, 2014).

Stakeholder dimaknai sebagai individu, kelompok/organisasi yang memiliki kepentingan, terlibatan, atau di pengaruhi oleh kegiatan/program pembangunan (Sjaifudian, Ford, & Bandung Trust Advisory, 2003). Dalam mengidentifikasi stakeholder ada 3 unsur yang dapat di gunakan untuk syarat individu atau kelompok di anggap sebagai stakholder, apabila memiliki unsur kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. unsur itu juga menentukan sejauh mana individu atau kelompok itu mempunyai arti yang penting (Mitchell, Agle, & Wood, 1997). Pada pengelolaan pariwisata

pemangku kepentingan di bagi menjadi stakeholder primer/utama sebagai individu atau kelompok yang mendukung sangat penting untuk kelangsungan hidup dan fungsi organisasi sektor pariwisata, dan stakeholder sekunder sebagai individu atau kelompok yang tidak penting untuk kelangsungan hidup organisasi tetapi yang di masa lalu, sekarang atau dimasa depan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi (Clarkson, 1995).

Pengembangan kampung wisata melibatkan Lurah patehan sebagai bagian dari perangkat kampung mempunyai peran sebagai fasilitator berperan memberikan atau menyediakan fasilitas yang mampu mencukupi kelompok sasaran, koordinator berperan mengkoordinasi antara stakeholder, dan implementer sebagai pelaksana dari kebijakan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai Stakholder yang mempunyai kewajiban atas ruang lingkup yang sudah diatur dengan tupoksinya dan bertanggung jawab kepada Walikota Yogyakarta. Dengan demikian Lurah Patehan dan Dinas Pariwisata Kota mempunyai kekuasaan, legitimasi, serta urgensi sesuai peraturan dengan perannya. Pada pengelolaan pariwisata stakeholder di bagi menjadi dua dengan melihat intensitas keterlibatannya, pada kamwis Tamansari aktor yang terlibat yaitu Lurah Patehan dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagai stakeholder Primer/utama sebagai individu dan kelompok yang sangat penting dalam mendukung kelangsungan hidup dan organisasi Kamwis Tamansari.

Selain itu ada pemerintah Walikota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata DIY terkait sebagai stakeholder sekunder. Walikota Yogyakarta mempunyai peran sebagai policy creator “pengambil keputusan dan penentu suatu kebijakan”. Dinas Pariwisata DIY mempunyai peran sebagai policy creator “pengambilan keputusan dan penentu kebijakan”, koordinator “mengkoordinasi setiap stakeholder”, dan fasilitator “memfasilitasi juga mencukupi apa yang di butuhkan stakeholder” secara tidak

langsung dalam pengembangan kamwis Tamansari, stakeholder sekunder Clarkson (1995) dalam Zaenuri (2018) ini dianggap tidak penting bagi kelangsungan Kamwis Tamansari tetapi untuk masa lalu, sekarang, dan masa depan dapat juga mempengaruhi perkembangan wisata.

Menurut UU No. 10 tahun 2009 tentang, kepariwisataan (Sunaryo, 2013) ada dua lembaga swasta kepariwisataan yang di tetapkan sebagai mitra kerja pada wisata oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat sebagai pengelola wisata di suatu wilayah yaitu Badan Promosi, dan Gabungan Industri. Dinas pariwisata Kota Yogyakarta menggait ASITA, dalam kerjasamanya berupa mendatangkan wisata dengan bentuk pemaketan wisata kampung yang di koordinasi oleh Pemerintah atau dinas pariwisata kota Yogyakarta. Peneliti berpendapat pihak Swasta yang terlibat dalam pengembangan kampung wisata Tamansari mempunyai kekuasaan, legitimasi, serta urgensi sesuai UU No. 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan. ASITA Yogyakarta termasuk dalam Pemangku kepentingan sekunder. Mereka mempunyai peran sesuai dengan pengembangan wisata terkait dengan pelaksana dari kebijakan. Namun dari segi keterlibatan dalam pengembangan kampung Wisata ASITA terlibat secara tidak langsung, keterlibatan mereka juga bersifat luas tidak hanya berfokus dalam satu objek wisata.

Beda hal dalam pengelolaan dan pengembangan Kampung wisata Tamansari tidak ada campur tangan swasta yang mempunyai perannya secara langsung, semua yang menyangkut pelayanan untuk wisatawan kampung wisata Tamansari di sajikan oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari pengelola dan pelaku wisata. Pihak kamwis Tamansari hanya melakukan kerjasama dengan pihak akademisi UGM secara langsung dalam pengembangan kampung seperti pengkajian untuk masyarakat dalam pengelolaan homestay walaupun di kampung tidak

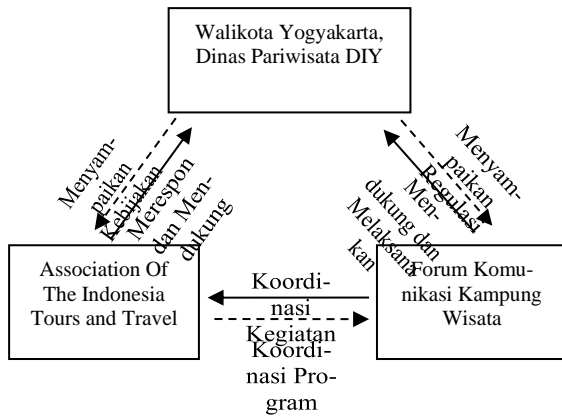
memiliki fasilitas Homestay. Pihak akademisi juga memberi masukan serta bantuan mengenai pengelolaan wc yang sebagai sarana dalam wisata kampung. Dalam kerjasama ini masyarakat kampung berhasil mengembangkan wc umum untuk wisatawan yang mampu memberikan dampak positif kepada pendapatan kampung wisata Tamansari. Dari uraian diatas Peneliti berpendapat pihak Akademisi yang terlibat dalam pengembangan kampung wisata Tamansari mempunyai kekuasaan, legitimasi, serta urgensi sesuai RENSTRA Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan Perwal No.115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kampung wisata. Akademisi sebagai stakeholder utama/primer yang terlibat secara langsung dalam pengembangan Kampung wisata Tamansari yang di koordinasi oleh pengelola kampung wisata Tamansari. Pihak akademisi mempunyai sebagai Implementer berperan sebagai pelaksana dari kebijakan.

Urusan dalam penyelenggaraan di bidang pariwisata peran masyarakat sudah tidak bisa di ragukan lagi, apalagi dalam urusan wisata desa/kamwis keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pengembangan wisata secara individu atau kelompok. Mendukung pendapat diatas kampung wisata merupakan pariwisata berbasis masyarakat kegiatan pembangunan yang dilakukan sepenuhnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, dengan ide dan pengelolaan secara terlibat dan pemanfaatan dapat langsung di rasakan oleh masyarakat setempat (Sidiq & Resnawaty, 2017; Demartoto, 2009; Nugroho 2017; Muallidin, 2007). Dari pihak masyarakat Stakeholder Primer/utama Kamwis Tamansari dari adalah pengelola kampung wisata dan pelaku wisata/penyedia jasa wisata yang mempunyai keterlibatan secara langsung dengan wisatawan dalam memberikan pelayanan maupun dalam memperkenalkan produk dan atraksi wisata. Pengelola kampung wisata yang ketuanya di pilih langsung oleh lurah

Patehan bertugas mengkoordinasi dalam mengurus semua yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan wisata. Pengelola kamwis Tamansari mempunyai peran sebagai fasilitator “menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kelompok sasaran”, koordinator “mengkoordinasi stakeholder yang terlibat”, dan implementer “pelaksana dari kebijakan”. Sedangkan Pelaku/Penyedia Jasa wisata mempunyai peran sebagai koordinator, dan Implementer.

Untuk Stakeholder Sekunder dari pihak masyarakat dalam pengembangan Kampung wisata adalah Forum Komunikasi kampung wisata yang di bentuk dari semua kampung wisata di Kota Yogyakarta, Tujuan di bentuknya Forum Komunikasi Kampung Wisata adalah sebagai sarana dan media tukar untuk informasi, komunikasi, dan kerjasama antara pengelola kampung wisata dalam upaya pengembangan kampung wisata itu sendiri. Dengan memiliki tugas menampung dan menyampaikan aspirasi serta permasalahan yang terjadi pada kampung wisata kepada dinas pariwisata, Forkom Kamwis mempunyai peran sebagai Stakeholder pelaksana dari kebijakan. Pada pengelolaan pariwisata stakeholder di bagi menjadi dua dengan melihat intensitas keterlibatannya, peneliti mengidentifikasi Forkom dengan tiga unsur yaitu kekuasaan, legitimasi, serta urgensi dengan menyesuaikan peraturan UU No. 10 tahun 2009, tentang kepariwisataan, dan Perwal No.115 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kampung wisata.

Pola Hubungan Kerjasama Stakeholder
Gambar 1.
Stakeholder Sekunder



Sumber: diolah dari data primer

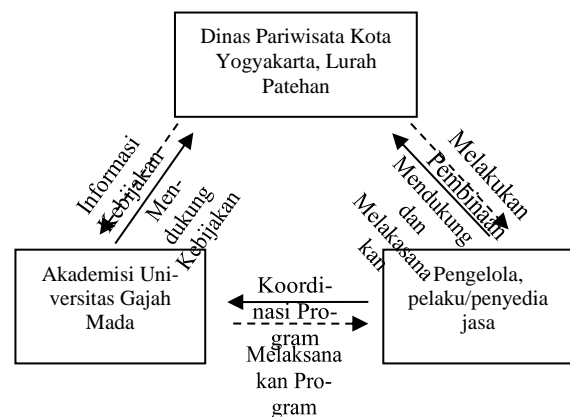
Dari gambar 1 pola hubungan kolaborasi yang dilakukan oleh Stakeholder sekunder diatas dalam pengembangan Kampung wisata khususnya kampung wisata Tamansari menunjukkan pihak stakeholder terkait saling membutuhkan dalam upaya pengembangan Kamwis di Kota Yogyakarta. Keterlibatan mereka sebagai stakeholder pengembangan Kamwis dapat disimpulkan bahwa pemerintah di dalamnya ada walikota dan Dinas pariwisata DIY mempunyai kendali yang besar sebagai aktor yang membuat regulasi serta kebijakan untuk masyarakat dan swasta dalam menjalankan pengembangan kampung.

Sedangkan untuk Stakeholder sekunder dari masyarakat sendiri dibentuklah sebuah FORKOM (Forum Komunikasi Kampung Wisata) yang di mana mempunyai kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan regulasi penyelenggaraan serta pengembangan kampung wisata. Paling tidak dengan adanya Forum Komunikasi Kampung Wisata ini mempermudah koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan swasta terkait program yang akan dilakukan untuk pengembangan kampung.

Untuk pihak swasta dari Stakeholder sekunder terdiri dari ASITA sebagai pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata mempunyai kewajiban dalam membantu

pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata di setiap daerah melalui perwakilan di daerah. Dalam pengembangan kampung wisata di Kota Yogyakarta ASITA mempunyai peran merespon dan mendukung semua kebijakan pemerintah di bidang pariwisata khususnya kampung wisata, merespon dalam bentuk usulan dan mendukung berbentuk program yang akan disiapkan untuk masyarakat dalam pengembangan Kampung wisata.

Gambar 2.
Stakeholder Primer/utama



Sumber: diolah dari data primer

Pada gambar 2 keterlibatan mereka sebagai stakeholder primer pengembangan Kamwis dapat dilihat bahwa pemerintah di dalamnya ada Dinas Pariwisata kota Yogyakarta dan Lurah Patehan mempunyai kewajiban yang besar sebagai aktor yang menjalankan regulasi serta kebijakan dalam bentuk pembinaan untuk masyarakat dan menginformasikan kebijakan ke Akademisi. Sedangkan pengelola Kampung wisata Tamansari dan pelaku/jasa wisata yang di mana mempunyai kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan/mengikuti pembinaan yang diadakan oleh lurah Patehan dan dinas pariwisata kota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan pengembangan kampung wisata.

Masyarakat juga melakukan kerjasama dengan UGM sebagai pihak Akademisi yang mendukung kebijakan pemerintah mengembangkan sektor pariwisata di kampung wisata

Taman sari, melalui koordinasi yang dilakukan oleh pihak pengelola kampung. Dalam pengembangan kampung wisata Tamansari akademisi mempunyai peran di dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Kampung Wisata Tamansari yaitu berupa pangkajian.

Tatakelola Kolaborasi Dalam Pengembangan Kampung Wisata Tamansari

Salah satu konsep governance yang paling mengedepankan prinsip kerjasama dan untuk menjelaskan fenomena kolaborasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan dikembangkan adalah konsep Collaborative Governance (Zaenuri, 2018). Dimana collaborative governance berkaitan dengan governance atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tipenya. Konsep ini berpikir ketika dalam sesuatu kondisi penting akan ada kerjasama antara aktor public dan aktor swasta yang nantinya akan menciptakan sesuatu produk hukum, aturan, dan kebijakan untuk penyelenggaraan publik (Ansell & Gash, 2008).

Mendukung pendapat di atas, Collaborative Governance didefinisikan sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan banyak bersifat umum yang tidak bisa diciptakan jika dilakukan dengan satu pihak (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Konsep Collaborative Governance suatu proses yang mempunyai sifat bertransformatif, proses transmisi kolaboratif bermula dari kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lain dengan sifat komando, pada tahap ini pemerintah mempunyai kontrol yang kuat, pemangku kepentingan lain tidak terlibat dalam pengambilan keputusan (hirarki). Berikutnya Coordination pemerintah dan pemangku lain sudah terjadi proses

pengambilan keputusan dengan sifat Kolektif, kemudian hubungan bersifat kolektif tersebut meningkat menjadi hubungan bersifat kooperatif. Dimana hubungan kooperatif ini sudah adanya berbagi ide dan sumberdaya dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat bersama. Pada tahap akhir adalah hubungan yang bersifat kolaboratif, sifat kolaboratif ini sudah terjadinya hubungan sampai tahap berbagi kreasi yang berwujud bentuk lembaga dengan sifat permanen dan otonom (Shergold, 2008).

Menurut Wildavsky (1973), sebagaimana dikutip oleh Wanna and O'Flynn (2008, p. 3) bahwa kolaborasi melibatkan beberapa dimensi yang berbeda. Pertama, kolaborasi bisa melibatkan kerjasama untuk membangun kesamaan, meningkatkan konsistensi dan menelaraskan kegiatan antara aktor-aktor. Kedua, kolaborasi dapat menjadi proses negosiasi, yang melibatkan kesiapan untuk berkompromi dan membuat trade-off. Ketiga, kolaborasi dapat melibatkan peran pengawasan, pemeriksaan, menarik bersama-sama dan koordinasi pusat. Keempat, kolaborasi dapat melibatkan kekuasaan dan pemaksaan, kemampuan untuk memaksa hasil atau memaksakan preferensi sendiri kepada yang lain, sampai batas tertentu, dengan kepatuhan atau keterlibatan mereka. Kelima, kolaborasi dapat melibatkan komitmen dan niat masa depan, kemungkinan berperilaku, perencanaan atau persiapan untuk menelaraskan kegiatan. Keenam, kolaborasi dapat menumbuhkan keterlibatan, pengembangan motivasi internal dan komitmen pribadi untuk kegiatan, keputusan, tujuan organisasi atau tujuan yang lebih strategis. Meskipun kenyataannya dari keenam dimensi yang ada tersebut tidak selalu berjalan konsisten atau pelengkap satu sama lain, tetapi juga bisa bersifat saling eksklusif.

Menurut Ansell and Gash (2008, p. 545) Collaborative Governance mempunyai 6 kriteria, adanya forum yang melibatkan lembaga publik maupun aktor-aktor yang menjadi

lembaga publik formal, aktor non publik atau pemerintah juga termasuk di dalam forum tersebut, semua yang terlibat mempunyai andil dalam mengambil keputusan, forum bersifat formal yang merupakan rapat bersama, forum sebagai tempat musyawarah dan mufakat, fokus kolaborasi pada kebijakan dan pengelolaan public. Adapun model tahapan dan proses collaborative Governance mulai dari kondisi awal (Starting Conditions) mengatur dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan model sosial yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kolaborasi. Kedua, Kepemimpinan fasilitatif (Facilitative leadership) menyediakan mediasi penting dan fasilitas untuk proses kolaborasi. Desain kelembagaan (Institutional design) menetapkan aturan dasar dimana kolaborasi berlangsung. Terakhir terjadinya proses kolaborasi yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 1). Dialog tatap muka (face to face dialog); 2). Membangun kepercayaan (trust building); 3). Komitmen terhadap proses (commitment to the proses); 4). Berbagi pemahaman (shared understanding); dan 5). Hasil sementara (Intermediate outcomes) (Ansell & Gash, 2008). Setelah mengidentifikasi dari keterlibatan stakeholder Sekunder dan stakeholder primer/utama.

Untuk kolaborasinya memfokuskan ke Stakeholder primer, di karenakan stakeholder primer mempunyai keterlibatan yang secara langsung dalam pengembangan kampung wisata Tamansari. Jika di lihat dari keterlibatannya stakeholder primer merupakan penggerak utama kolaborasi yang terjadi di kampung wisata Tamansari.

Dalam konsep kolaborasi dapat di jelaskan dengan cara peneliti mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terlebih dahulu dalam kolaborasi pengembangan wisata kampung Tamansari dengan tujuan untuk lebih memahami proses kolaborasi yang terjadi.

Ketidak Seimbangan Sumber daya

Pihak pemerintah menjaga sumber daya masyarakat dengan pengamatan berupa pembinaan seperti mengadakan workshop dan

pelatihan yang di adakan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat kampung wisata Tamansari. Maka dalam kolaborasi masyarakat mempunyai keseimbangan dalam pengembangan kampung wisata tamansari karena tetap di jaga oleh dinas pariwisata kota yogyakarta dan stakeholder lainnya seperti pihak akademisi yang juga terlibat di dalam pengembangan kampung dan meningkatkan sumberdaya masyarakat. Dalam kolaborasinya pihak masyarakat juga tidak perlu khawatir karena pengembangannya juga hanya di lakukan oleh beberapa stakeholder yang telah di koordinasi sebelum memulai kerjasama.

Insentif Untuk Berpartisipasi

Pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta dan Lurah Patehan berpartisipasi dalam kolaborasi untuk pengembangan kampung wisata ini dengan tujuan mencapai visi bersama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pariwisata. Untuk tujuan pihak akademisi berpartisipasi adalah mendukung kebijakan pemerintah dengan melakukan program terkait pengembangan kampung wisata Tamansari.

Peace (1995) dalam (Sidiq & Resnawaty, 2017, p. 40), mengartikan perkembangan kampung wisata sebagai bagian dari suatu proses dengan menekankan cara mengembangkan atau memajukan desa wisata. Secara spesifik, pengembangan kampung di artikan sebagai upaya usaha untuk melengkapi dan meningkatkan fasilitas dalam objek wisata sebagai tujuan memenuhi kebutuhan wisatawan yang berkunjung. Masyarakat setempatlah yang mempunyai peran penting dalam usaha perkembangan yang juga sebagai tuan rumah karena sudah pasti sumber daya dan keunikan tradisi maupun budaya sudah melekat pada komunitas yang sebagai unsur utama pada kegiatan wisata. Keberhasilan pengembangan kampung wisata tergantung pada tingkat penerimaan yang dilakukan masyarakat dan tingkat dukungan dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam kolaborasi pengembangan kampung sangatlah besar karena dari kerjasama yang di lakukan, masyarakat mendapatkan keuntungan. Walaupun bisa di katakan bahwa partisipasi masyarakat tidak bersifat suka rela tetapi dengan adanya keuntungan yang di dapat dari kerjasama yang di lakukan berupa pengembangan kampung wisata Tamansari membuat partisipasi masyarakat akan semakin tinggi.

Prasejarah Antagonisme dan Kerjasama

Merujuk pada prasejarah kampung Tamansari tercipta dari potensi yang ada pada objek wisata yang di miliki keraton yogyakarta. Objek wisata itu di kenal dengan Tamansari yang berupa bangunan cagar budaya, masyarakat dalam kampung tidak di libatkan dalam pengelolaanya karena untuk menjaga kelestarian dari bangunan cagar budaya itu sendiri. Maka semakin ke sini masyarakat memanfaatkan peluang dalam prospek pariwisata, dalam mengembangkan objek wisata kampung yang berawal dari potensi heritage, dan budaya masyarakat.

Serta dengan adanya konsep kampung wisata Tamansari masyarakat tidak hanya memfasilitasi wisatawan yang berkunjung di kampung wisata Tamansari, melainkan secara tidak langsung juga ikut memfasilitasi wisatawan yang berkunjung di Objek wisata Tamansari. sejarah kerjasama yang terjadi pada masyarakat tidak menimbulkan sifat antagonisme karena kerjasama yang di lakukan tidak bersifat MOU, yang dapat mempengaruhi hubungan antara Stakeholder yang terlibat nantinya. Dimana masyarakat hanya mendukung perkembangan dari pariwisata yang sudah ada dengan menyediakan jasa wisata di kampungnya.

Kepemimpinan Fasilitasi (Facilitative Leadership)

Pengelolaan kampung wisata Tamansari tidak terlepas dari sosok pemimpin yang mampu berkerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat serta memiliki pengetahuan berkaitan dengan pariwisata dan pengalaman

yang baik pula di pariwisata. Pemimpin dalam kampung wisata Tamansari adalah ketua pengelola kampung itu sendiri dengan mempunyai peran mengurus segala kebutuhan yang di perlukan untuk kampung wisata Tamansari, dan mengorganisir masyarakat untuk menyiapkan atraksi di sana.

kampung wisata Tamansari mempunyai pemimpin yang berperan penting di dalam pengembangan kampung wisata Tamansari. Tidak hanya itu ketua kampung wisata Tamansari juga sebagai penampung aspirasi masyarakat kampung, serta mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan kampung, dan juga sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah/stakeholder lain. Masyarakat seperti pelaku/penyedia jasa kampung masih mengandalkan seorang tokoh pemimpin yang menjadi panutan dalam kegiatan atau pengambilan kebijakan dalam pengembangan kampung, tentu itu tidak baik untuk kebutuhan kedepannya dalam jangka panjang.

Desain Kelembagaan (Intitutional Design)

Design kelembagaan Kampung wisata sudah di atur dalam bentuk peraturan dasar yang jelas termasuk keterlibatan partisipasi antara masing-masing pemangku dengan perannya. Adanya aturan itu juga sangat di butuhkan sebagai acuan penyelenggaraan kampung wisata agar pengembangan kampung dapat terarah, di dalam peraturan penyelenggaraan kampung wisata juga mewajibkan seluruh kampung wisata untuk memiliki kelembagaan dan legalitas secara formal. Dalam pengembangan kampung wisata Tamansari design kelembagaan itu pun terwujud berdasarkan peraturan yang sudah ada, jadi akan memperjelas siapa yang menjadi pemangku kepentingan di dalam kampung wisata Tamansari.

Pada kelembagaan kampung Tamansari sendiri dalam upaya pengembangan kampung di pandang perlunya penguatan kelembagaan, dengan meningkatkan kualitas dari kelembagaan agar kerjasama pada pengembangan

dapat berjalan dengan baik. Perlunya penguatan itu dikarenakan Pengurus yang ada pada kelembagaan kampung wisata masih memiliki perkerjaan utama yang membuat keterlibatan dalam pengembangan kampung menjadi kurang optimal. Pada kelembagaan kampung wisata Tamansari sendiri tidak tertulis pihak akademisi yang ikut terlibat. Kelembagaan kampung Tamansari pula masih belum mempunyai legalitas secara formal, hanya memiliki surat keputusan dari kelurahan setempat.

Proses Kolaborasi (Collaborative Process)

Selanjutnya setelah membahas faktor yang mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, sekarang peneliti membahas tentang proses kolaborasinya.

Komunikasi dialog tatap muka (face to face)

Pada dialog terkait kolaborasi dalam pengembangan kampung wisata Tamansari dalam lingkup masyarakat di mulai dengan pertemuan yang di lakukan masyarakat kampung menyangkut permasalahan-permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi tersebut, dapat di katakan sebagai pemicu kolaborasi spontan yang akan terjadi di lingkungan masyarakat sebagai pelaku/penyedia jasa wisata. Hal itu sangat berguna karena dari permasalahan yang terjadi dapat mempengaruhi pengembangan kampung sebagai kampung wisata. Dialog juga di lakukan bersama pihak lain yang ikut terlibat dalam pengembangan kampung seperti halnya dinas pariwisata kota yogyakarta, lurah patehan, dan pihak akademisi UGM. Dialog komunikasi tatap muka di lakukan dengan pihak akademisi UGM dengan masyarakat dalam hal pengkajian terkait pengembangan kampung wisata Tamansari berupa penelitian dan kajian yang di koordinasi oleh pengelola kampung wisata Tamansari. Penelitan serta kajian itu bertujuan untuk memberi arahan dalam pengelolaan kampung wisata. Dialog tatap muka yang di lakukan dengan pertemuan aktor tidak berjalan secara bersinergi karena keterlibatan pemerintah dinas pariwisata kota

yogyakarta saat ini dalam pertemuan berdialog lebih sering di lakukan di dalam bentuk pembinaan yang di buat bersamaan dengan pertemuan kampung wisata lainnya. Untuk pertemuan yang lebih sering di lakukan oleh pihak pemerintah dari kelurahan dengan masyarakat untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan pengembangan kampung wisata maupun permasalahan yang terjadi di kampung wisata Tamansari.

Membangun Kepercayaan (Trust Building)

Pelaksanaan pengembangan kampung wisata Tamansari tidak mungkin di lakukan hanya dengan satu pihak saja. Namun juga harus di lakukan dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan mempunyai wewenang dalam pengembangan kampung wisata Tamansari. Semua itu di karenakan aturan dalam penyelenggaraan kampung wisata, masing-masing pihak sudah mempunyai tugasnya.

Dalam pengembangan di kampung wisata Tamansari kepercayaan aktor masyarakat meliputi pengelola dan pelaku/penyedia jasa wisata sangat di perlukan untuk bekerjasama dengan aktor lain yang terlibat, itu karena masyarakat sebagai roda penggerak berbagai kegiatan di kampung wisata. Kepercayaan masyarakat pun sudah tumbuh seiring adanya pertemuan yang di lakukan antar aktor yang terlibat dalam pengembangan kampung.

Pemerintah melalui dinas pariwisata kota yogyakarta, dan kelurahan membangun kepercayaan masyarakat dengan melakukan pembinaan dan menjalankan suatu program yang dapat menguntungkan masyarakat kampung wisata Tamansari serta dari pembinaan itu pula masyarakat akan merasakan manfaat dari kerjasama tersebut. Begitu pula dengan akademisi yang melakukan pengkajian terkait pengembangan kampung sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat, berupa persetujuan dalam keterlibatannya di Kampung wisata Tamansari.

Komitmen terhadap proses (Commitment ToProcess)

Dalam hal ini pengembangan kampung wisata Tamansari pihak yang terlibat, perangkat daerah dinas pariwisata kota Yogyakarta dan lurah Patehan, akademisi, dan pengelola serta pelaku/penyedia jasa wisata saling berkomitmen. Pihak pemerintah berkomitmen dengan terus melakukan pembinaan dan pemasaran kampung wisata secara menyeluruh dikarenakan kampung wisata dinilai memiliki potensi yang menarik dalam bidang pembangunan destinasi pariwisata khususnya pariwisata kota Yogyakarta, pihak akademisi selalu melakukan pengkajian untuk ikut terlibat dalam pengembangan kampung wisata Tamansari seperti halnya pengembangan fasilitas dan pengembangan SDM di kampung Tamansari.

Pihak masyarakat terus melakukan kegiatan berupa mendukung dan melaksanakan semua hal yang berkaitan dengan kampung wisata seperti halnya melakukan pengelolaan kampung wisata, menyiapkan atraksi wisata, dan memberi pelayanan untuk wisatawan seperti menyiapkan fasilitas dan sarana prasarana di kampung wisata Tamansari.

Kemudian masyarakat kampung melakukan kegiatan dengan upaya meningkatkan pelayanan dalam penyajian atraksi melalui SOP sesuai dengan 7 aspek sapta pesona. Komitmen tersebut berwujud dengan pelaksanaan tugas dan wewenang masing masing aktor.

Pemahaman Bersama (Shared Understanding)

Dalam pengembangan kampung wisata Tamansari, pemahaman bersama di buktikan dengan adanya pertemuan komunikasi antara aktor yang terlibat di dalam pengembangan kampung wisata Tamansari, pertemuan itu di adakan secara formal dan informal (resmi atau tidak resmi), dari pertemuan tersebut dimulai dari penyampaian Visi maupun Misi pemerintah kota Yogyakarta yang di tujukan untuk semua pihak secara luas dan terbuka, dan di dukung dengan kebijakan dan program

di bidang pariwisata berupa penyelenggaraan kampung wisata kepada aktor yang berkaitan di dalamnya seperti pihak pemerintah, masyarakat, maupun akademisi.

Pelaksanaan kebijakan dan program tersebut pun di laksanakan dengan pembagian tugas dan wewenang kepada pihak/aktor yang memiliki keterampilan di bidangnya. Dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari rasa saling percaya dan komitmen yang kuat agar nantinya tercapainya suatu tujuan dalam pengembangan kampung wisata Tamansari.

Hasil Antara (Intermediate Outcomes)

Hasil dari kerjasama yang terjadi pada pengembangan kampung wisata Tamansari selama ini memberikan dampak multifier effect yang cukup baik untuk perkembangan kampung dan unsur di dalamnya. Semua itu tercapai dari keterlibatan masyarakat, pemerintah, maupun akademisi yang terlibat di dalam pengembangan kampung wisata Tamansari. Dengan adanya pembinaan, akreditasi, dan surveillence yang di lakukan oleh pemerintah dinas pariwisata kota Yogyakarta dan lurah Patehan membuat peningkatan produk pariwisata di tamansari seperti halnya sebelumnya, serta berkembangnya pemahaman masyarakat tentang pariwisata, dan juga sekarang melalui program yang ada membuat kampung wisata Tamansari lebih di kenal. Serta pengkajian yang di lakukan pihak akademisi berupa pengadaan WC umum membuat pelayanan yang di berikan langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari pengelola kampung wisata kepada wisatawan menjadi meningkat. bahwa kerjasama yang sudah ada dalam pengembangan kampung wisata menghasilkan peningkatan untuk masyarakat maupun kampung wisata Tamansari sendiri dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Dari pelayanan yang di berikan tersebut memberikan feedback berupa peningkatan wisatawan dan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung wisata Tamansari karena sekarang banyaknya masyarakat yang menggantungkan diri pada

bidang pariwisata di kampung wisata Tamansari.

KESIMPULAN

Stakeholder primer dalam identifikasi yang peneliti lakukan merupakan pihak yang mempunyai keterlibatan secara langsung dalam pengembangan kampung wisata Tamansari yaitu seperti, pihak pemerintah meliputi Dinas pariwisata kota Yogyakarta dan lurah patehan, Pihak masyarakat meliputi pengelola dan pelaku/penyedia jasa wisata, pihak akademi UGM. Untuk stakeholder sekunder merupakan pihak yang mempunyai keterlibatan tidak secara langsung pihak pemerintah meliputi Walikota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata DIY, Pihak masyarakat meliputi Forkom Kampung Wisata Kota Yogyakarta, dan pihak swasta meliputi ASITA.

Dalam pola hubungan kerjasama yang terjadi pada aktor primer dan sekunder belum seutuhnya menjalankan prinsip dari kolaborasi dengan melihat aktor yang terlibat dan intensitas hubungan kolaborasi yang terjadi. Jika dilihat intensitas pola hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat berkategori tinggi di bandingkan hubungan pemerintah dengan pihak akademisi yang relatif rendah, dan hubungan masyarakat dengan pihak akademisi berkategori sedang. Untuk Stakeholder sekunder jika dilihat dari intensitas pola hubungan kerjasama pemerintah dan masyarakat berkategori sedang jika di bandingkan hubungan pemerintah dengan pihak swasta yang relatif tinggi, dan hubungan antara masyarakat dengan pihak swasta berkategori rendah.

Dalam kolaborasi yang terjadi di pengaruhi oleh faktor Kepemimpinan Fasilitasi membuat Masyarakat pelaku/penyediaan jasa kampung masih mengandalkan seorang tokoh pemimpin yang menjadi panutan dalam kegiatan atau pengambilan kebijakan. Desain kelembagaan kampung wisata Tamansari yang dinilai kelembagaan kampung wisata Tamansari masih membutuhkan penguatan.

Pada Proses kolaborasi yang terjadi di kampung tamansari yang di lakukan oleh aktor tidak berjalan secara bersinergi karena pemerintah dinas pariwisata kota yogyakarta saat ini tidak hanya berfokus pada pengembangan kampung wisata Tamansari tetapi bersamaan dengan kampung wisata lain.

DAFTAR PUSTAKA

- A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of management review*, 20(1), 92-117.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Delapan kampung wisata di Yogyakarta jalani proses akreditasi. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/707706/delapan-kampung-wisata-di-yogyakarta-jalani-proses-akreditasi>
- Desa Wisata Sebagai Community Based Tourism. *Upajiwa Dewantara*, 1(2), 68-82.
- Desa/Kampung Wisata di DIY Bisa Jadi Industri Kreatif. Retrieved from https://krjogja.com/web/news/read/118223/Desa_Kampung_Wisata_di_DIY_Bisa_Jadi_Industri_Kreatif#
- Dinilai Tak Hasilkan Ekonomi 40 Persen Desa Wisata Mati Suri. Retrieved from https://krjogja.com/web/news/read/5810/40_Persen_Desa_Wisata_Mati_Suri
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Governing Through Collaboration In J. O'Flynn & J. Wanna Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia. Canberra: ANU Press.
- Hidayah, K., & Fatoni, M. (2019). Kampung Wisata Jadi Alternatif Destinasi Pariwisata di Kota Yogyakarta. Retrieved from

- <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/09/kampung-wisata-jadi-alternatifdestinasi-pariwisata-di-kota-yogyakarta>
- Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia: Penerbit Gava Media Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.
- Manajemen pelayanan publik: peduli, inklusif, dan kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy of management review*, 22(4), 853-886.
- Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta*, 02, 05-14.
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1).
- Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Retrieved from <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/494995588.html>
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata
- Program Akreditasi Kampung Wisata Yogyakarta Dituntaskan. Retrieved from <https://jogja.antaranews.com/berita/368231/program-akreditasi-kampung-wisata-yogyakarta-dituntaskan-2019>
- Sidiq, A. J., & Resnawaty, R. (2017). Pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat lokal di desa wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 38-44.
- Sjaifudian, H., Ford, F., & Bandung Trust Advisory, G. (2003). Inovasi, partisipasi, dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. Retrieved from <http://books.google.com/books?id=sCqOAAAAMAAJ>
- Sosiologi: suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tata kelola pariwisata-bencana berbasis collaborative governance: konsep, analisis, dan pemodelan: Explore.
- Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman. Universitas Brawijaya.
- Teori dan paradigma penelitian sosial: Tiara wacana Yogya.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Wanna, J., & O'Flynn, J. (2008). Collaborative Governance: A new era of public policy in Australia? Canberra: ANU Press.